

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rusia atau penerus Uni Soviet, dalam sejarahnya merupakan negara yang memiliki pengaruh kuat dalam dunia internasional. Kekuatan Uni Soviet pada masa itu digambarkan dalam upaya pendominasian Eropa pada pasca perang. Kekuatan Uni Soviet pasca perang berhasil didapat atas mobilisasi dan pemulihan politik dan ekonomi yang diperbarui (Harrison, 2011). Setelah perang dunia kedua usai, Uni Soviet membawa pengaruhnya kedalam sistem internasional. Pengaruh tersebut memberikan pandangan akan pembangunan internasional yang didasari oleh ide bahwa kepemilikan pribadi adalah akar dari semua konflik dan jawaban untuk dunia yang damai adalah dengan dihapusnya kapitalisme. Dalam hal ini beranggapan bahwa struktur politik otoriter terpusat merupakan hal yang perlu diimplementasikan oleh pemerintahan suatu negara (Kanet, 2006).



Peta Uni Soviet (*vidiani.com, n.d*)

Disisi lain, Uni Soviet bukanlah satu-satunya kekuatan baik ekonomi, militer dan politik yang mendominasi di arena internasional. Amerika Serikat yang pada saat pasca perang juga berhasil untuk membangun kembali basis ekonominya (Library of Congress, n.d). Bahkan faktanya, Amerika Serikat memiliki peningkatan Produk Domestik Bruto negara antara tahun

1941 dan 1945, hal ini memberikan kejayaan ekonomi yang sangat produktif dengan lapangan kerja penuh pada warga negara yang telah terbiasa dengan deprivasi

yang diakibatkan oleh depresi selama satu dekade (McMahon, 2003). Amerika Serikat dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat dalam cara membentuk sistem internasional, Amerika Serikat dengan paham Wilsonianisme menganggap bahwa sistem politik demokratis merupakan sistem yang harus diimplementasi suatu negara dan negara harus berjuang dalam sistem pasar bebas kapitalisme. Dengan ide tersebut, Amerika Serikat dianggap sebagai rival dari Uni Soviet dalam mempengaruhi pembaharuan Eropa pada pasca-perang tersebut (Kanet, 2006), oleh karena itu perbedaan pendapat dari kedua negara tersebut yang awalnya merupakan persaingan dua negara, pada saat itu berkembang menjadi konfrontasi global dan terjadi persaingan untuk mendapatkan pengaruh dalam dunia internasional. Uni Soviet dengan pengaruh akan ideologi komunisme dan bentuk pemerintahan otokrasi, sedangkan Amerika Serikat dengan pengaruh ideologi liberalisme dan bentuk pemerintahan demokrasi. Tahun 1950 adalah menjadi tahun pembentukan dua aliansi tersebut, yang dipimpin masing-masing oleh Amerika Serikat sebagai blok barat dan Uni Soviet sebagai blok timur (Kanet, 2006).

Pada perkembangannya, hubungan Uni Soviet dan Amerika Serikat semakin tegang atas aksi dan reaksi yang dilakukan oleh kedua negara. Seperti contoh adalah pada saat ketegangan antara kedua ini mencapai titik perbandingan kekuatan militernya pada tahun 1950-an. Amerika Serikat pada saat itu sedang mengembangkan kekuatan militernya yang menghasilkan penambahan personel tentara sebanyak setengah juta personel. Amerika Serikat juga menekankan pada pengembangan alat perang seperti pesawat terbang, kapal angkatan laut, kendaraan lapis baja, dan instrumen perang konvensional lainnya. Namun, yang paling menarik perhatian adalah pengembangan senjata nuklir Amerika Serikat. Amerika Serikat telah diketahui oleh negara-negara akan kekuatan nuklirnya yang dibuktikan oleh kejadian Hiroshima dan Nagasaki. Nuklir yang dikembangkan pada saat itu dianggap memiliki kekuatan lebih besar daripada senjata untuk menyerang Hiroshima dan Nagasaki dan siap untuk menarget Uni Soviet pada saat itu. Sebagai reaksi, Uni Soviet juga berupaya untuk meningkatkan kekuatannya yaitu dengan meningkatkan jumlah pasukan dari 3 juta menjadi 5 juta lebih, walaupun pada saat itu terdapat pemotongan anggaran militer. Namun, perbedaan perkembangan kekuatan ini digaris bawahi oleh ketidakmampuan Uni Soviet dalam menandingi kekuatan nuklir Amerika Serikat. Pasalnya Uni Soviet hanya bisa meluncurkan serangan hanya pada wilayah Eropa Barat. Disamping itu, Uni Soviet memiliki keunggulan atas keberhasilannya dalam pengembangan teknologi luar angkasa dan keberhasilannya untuk mengejar Amerika Serikat dalam pengembangan Misil (McMahon, 2003).

Pada perkembangannya, kontes ideologi dalam dunia internasional ini mencapai titik akhir itu sendiri. Uni Soviet pada saat itu mengalami kealahannya dalam Perang

Dingin yang ditandai oleh bubarnya Uni Soviet itu sendiri serta peleburan Uni Soviet menjadi 15 negara merdeka dan Russia merupakan *successor* secara *de facto* dari Uni Soviet (US-DOS, 2001). Sejak dibubarkannya Uni Soviet, Rusia sebagai penerus Uni Soviet membangun kembali kekuatan negaranya baik dalam politik dan ekonominya.

Rusia yang bukan anggota partai komunis dan dipilih dengan sistem pemilihan, Rusia dianggap masih kesulitan untuk mengembalikan kekuatannya dalam ekonomi dan politik, ditambah lagi dengan terhambatnya proses demokratisasi itu sendiri. Yeltsin dianggap mengesampingkan pembentukan kembali ekonomi Rusia dan lebih fokus kepada mempertahankan jabatannya. Selain itu, Rusia dibawah pemerinahannya yang memiliki ketidakstabilan politik membuat pembangunan Rusia itu sendiri terhambat (MacBain, 2008). Rusia pada saat itu dianggap lemah dan menimbulkan masalah baru seperti kecurangan pemilu, masyarakat sipil yang lemah, dan lingkungan yang membatasi perkembangan partai- partai independen yang kuat (Grovela & Aggarwal, 2012).



Peta Post-Soviet (Moore, 2012)

Rusia mengembalikan kekuatan ekonomi dan penerapan demokrasi membuat masyarakat Rusia mengambil pilihan untuk mengganti presidennya saat itu. Vladimir

Putin merupakan sosok yang dianggap mampu untuk menggantikan Yeltsin dan mengatasi kelemahannya. Putin yang merupakan bagian dari *Security Council of the Russian Federation* dan juga perdana menteri Russia pada era Yeltsin menegaskan bahwa dirinya ingin mengembalikan Rusia sebagai negara adidaya dengan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Rusia berhasil membuktikan kapabilitasnya dengan meningkatnya popularitas pada masa jabatannya. Hal ini didasari oleh keberhasilan pemimpin baru dalam mengembalikan Russia dan Pesemakmuran negara-negara ke status kekuatan global dan berhasil untuk memberikan layanan penting yang diperlukan kepada rakyat bangsa pada saat itu (MacBain, 2008).

Pada perkembangannya, Rusia sebagai negara yang memiliki ambisi yang kuat dalam kebijakan luar negerinya, hal ini didasari oleh kekuatan ekonomi dan politik yang semakin berkembang. Kemajuan ini diturunkan juga kepada pemimpin Russia selanjutnya pada tahun 2008 dianggap mampu untuk melestarikan kejayaan Rusia yang mengembalikan kekuatan Rusia dalam pengaruhnya dalam arena internasional atas ide modernisasi Russia, kekuatan ekonomi yang berkembang dan penggunaan sumberdaya politik dan militernya dalam melakukan hubungan dengan negara lain (Oldberg, 2007).

Dalam mengembalikan kekuatan Rusia dalam mempengaruhi dinamika internasional yang masih didominasi oleh Amerika Serikat, Rusia perlu untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya untuk menandingi dominasinya. Seperti contoh, Rusia mulai mengembangkan kekuatannya yang bertujuan untuk memperoleh kepentingan baik itu ekonomi dan politik di wilayah Asia-Pasifik. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia memiliki kepentingannya untuk menjalin kerjasama dengan negara yang memiliki pengaruh pada wilayah yang kuat, seperti Republik Rakyat Cina (RRC), India dan negara-negara ASEAN (Titarenko, 2008).

Khusus untuk wilayah Asia Tenggara, Rusia memiliki sejarah dalam mempengaruhi wilayah. Sebagai negara komunis, pada saat itu atau tepatnya saat Perang Dingin, Rusia

atau Uni Soviet bersaing dengan Amerika Serikat dalam memberikan pengaruh kepada negara-negara pada kawasan tersebut. Seperti contoh, Rusia memiliki sedikit pengaruh terhadap negara non-komunis di Asia Tenggara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Hubungan Russia dan negara non komunis tersebut sebatas kepentingan ekonomi nominal dan keterlibatan politik yang tidak menentu. Namun, dibalik dominasi Amerika Serikat atas pengaruhnya dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan ekonomi suatu negara, Rusia memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Seperti contoh Rusia memiliki hubungan yang erat dengan Vietnam, Russia dianggap memiliki andil dalam kemenangan Vietnam atas Amerika Serikat dan kedua negara setuju akan perjanjian *Treaty of Friendship and Cooperation* pada 1978. Selain Vietnam, Rusia memilih Indonesia sebagai partnernya (Kapoor, 2020).

Sebagai salah satu mitra Rusia, Indonesia mengalami perubahan situasi politik, ekonomi dan sosial budayanya saat pergantian pemerintahan yang mempengaruhi hubungannya dengan Soviet. Indonesia yang awalnya memiliki partai komunis yang cukup besar dari segi anggotanya tidak lagi. Perseteruan antara kelompok militer dan komunis yang menghasilkan penghapusan komunis di Indonesia yang menyebabkan ratusan hingga jutaan anggota komunis meninggal. Dalam hal ini, Indonesia memiliki condong untuk berkoalisi dengan Amerika Serikat, sebagaimana Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Indonesia pada saat itu untuk melangsungkan gerakan Anti-Komunis (Guan, 2003).

Namun seiring dengan runtuhnya Uni Soviet, Rusia ingin mengulang kembali kerjasamanya dengan negara-negara di ASEAN, Rusia kembali berhasil dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Salah satu negara yang kembali bekerjasama dengan Rusia adalah Indonesia yang tercermin dalam perjanjian *Declaration on the Foundations of Friendly and Partner Relations* pada tahun 2003

(Kapoor, 2020).

Perkembangan hubungan Indonesia dan Rusia dianggap meningkat saat Indonesia berada Pada tahun 2014, hubungan Indonesia dan Rusia meningkat dengan bukti bahwa telah terdapat tiga pertemuan antara kedua kepala negara tersebut. Indonesia sendiri dianggap merupakan mitra penting bagi Russia di Asia Tenggara bersamaan dengan Vietnam dan Myanmar (Maulana, 2017). Rusia dan Indonesia memfokuskan kerjasamanya dalam ekonomi, sosial dan budayanya. Walaupun demikian, Rusia memiliki hubungan erat dengan Indonesia dibidang pertahanan militer. Indonesia dan Russia membentuk *Commission on Military Technical Cooperation* pada awal 2000an (Manurung, 2018).

Hubungan Indonesia dan Russia dibidang pertahanan militer direfleksikan oleh kebutuhan Indonesia akan penguatan pertahanannya. Ditambah dengan fakta bahwa Russia merupakan negara dengan pertahanan militer termaju serta merupakan pengeksport senjata terbesar di Asia Tenggara yang berkisar total 12 juta dollar AS pada 1990 sampai 2019, sehingga dengan adanya hal tersebut negara Rusia menjadi pilihan untuk Indonesia dalam melakukan kerjasama dibidang pertahanan.

Berdasarkan data, Russia merupakan negara pengimpor terbesar kedua dalam persenjataan setelah Korea Selatan bagi Indonesia dari tahun 1998-2019 (Kapoor, 2020).

Country	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total (1990-2019)
Viet Nam	1062	742	706	467	335	138	7375
Malaysia							1862
Myanmar	28	12		66	75	4	1672
Indonesia	54						1147
Laos					58	18	169
Thailand		14			14		50

Ekspor senjata Russia ke negara ASEAN 1990-2019 dalam AS dollar (Kapoor, 2020)

	Top exporter	2 nd largest exporter	3 rd largest exporter
Vietnam	Russia (6831)	Israel (428)	Ukraine (223)
Malaysia	Russia (1311)	Germany (1065)	Spain (591)
Myanmar	China (1804)	Russia (1591)	India (166)
Indonesia	South Korea (1221)	Russia (1147)	Netherlands (1079)
Laos	Russia (125)	China (91)	Ukraine (52)
Thailand	USA (780)	China (470)	Sweden (459)
Singapore	USA (6448)	France (2266)	Germany (739)
Philippines	USA (414)	South Korea (315)	Indonesia (180)
Cambodia	China (118)	Ukraine (54)	Serbia (30)
Brunei	Germany (322)	USA (95)	France (45)

Top eksporter senjata ke negara
ASEAN 1998-2019 dalam AS dollar
(Kapoor, 2020)

Pada perkembangannya, Russia dan Indonesia menunjukkan tren positif dalam kerja sama dalam bidang pertahanan. *Indonesian Defence White Paper 2015*, Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dibidang pertahanan militer. Indonesia juga menegaskan untuk peningkatan kerjasama dengan melaksanakan pertemuan per tahun untuk membahas kerjasama dibidang pertahanan militer itu sendiri (Menhan RI, 2015), seperti contoh pada tahun 2014 disaat Rusia dan Indonesia mendirikan perjanjian kerjasama pertahanan berupa pinjaman finansial sebesar 335 juta dolar Amerika Serikat untuk pembelian enam *Sukhoi fighter planes*. Indonesia menganggap bahwa dengan kerja sama dengan Rusia lebih menguntungkan dikarenakan kualitas produk Rusia serta penawaran yang menguntungkan, Pentingnya Rusia bagi Indonesia tercermin dalam perencanaan strategis Indonesia 2015-2019 yang mana Indonesia akan membeli peralatan militernya kepada Russia (Manurung, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Rusia dalam menjalin kerjasama pertahanan militer dengan Indonesia pada tahun 2014-2019?”

C. Kerangka Teori

Dalam analisis yang akan dilakukan di penelitian ini, penulis menggunakan Teori *Decision Making Process* oleh William D. Coplin. Penulis menggunakan teori ini sebagai kerangka pemikiran karena dianggap relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini dan menganalisa permasalahan yang ada. Teori *Decision Making Process* dianggap penulis relevan dalam menjelaskan faktor kepentingan Russia dalam bekerja sama dengan Indonesia di bidang pertahanan militer pada tahun 2014-2019. Berikut merupakan penjelasan mengenai Teori *Decision Making Process*:

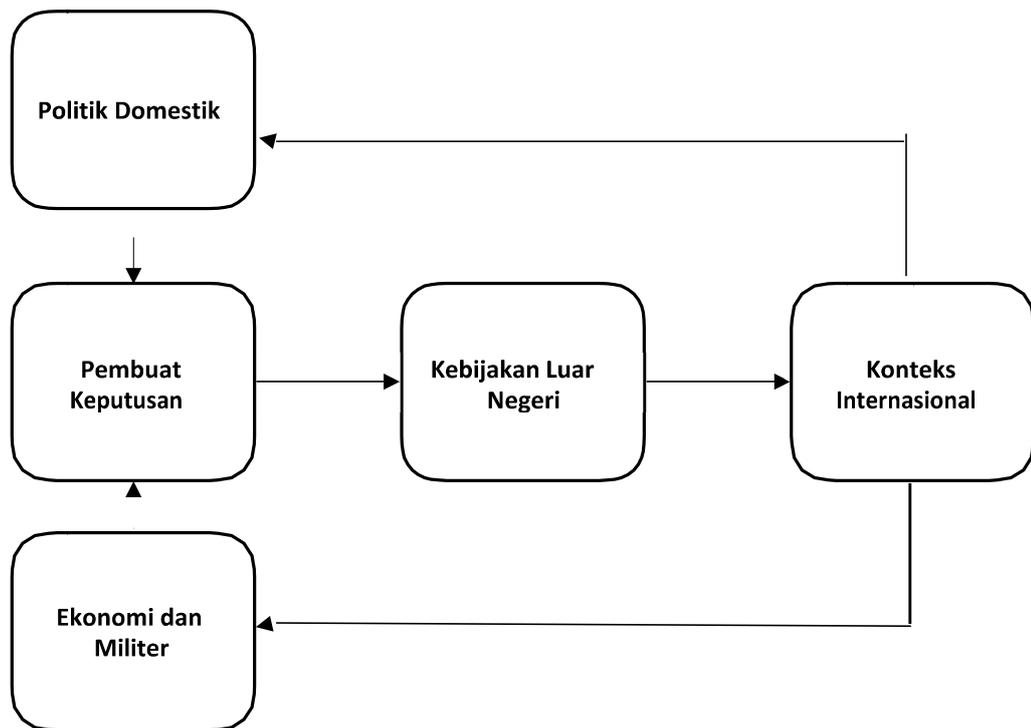
Teori *Decision Making Process*

Teori *Decision Making Process* atau disebut sebagai teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri merupakan kerangka pikir yang digunakan untuk menjelaskan pertimbangan atas pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh suatu pemimpin negara (Coplin, 2003). Kebijakan luar negeri itu sendiri didefinisikan oleh McGraw sebagai alat untuk menentukan dan mengidentifikasi keputusan, strategi, dan akhir interaksi suatu negara dengan negara lain. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri suatu negara merupakan ‘kompas’ bagi suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan meraih posisinya dalam arena internasional (Held, D, dkk, 1999).

Menurut Coplin, pemimpin suatu negara yang biasanya merupakan presiden, perdana menteri bahkan raja memiliki tiga pertimbangan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. *Pertama*, adalah situasi politik domestik suatu negara tersebut. Coplin menegaskan bahwa dalam merumuskan keputusan luar negeri, pembuat keputusan dipengaruhi oleh aktor politik domestik lainnya atau disebut sebagai *policy influencer*. Walaupun pembuat keputusan merupakan aktor utama dalam membuat keputusan itu

sendiri, menimbang pengaruh aktor domestik lainnya sangat penting bagi pembuat keputusan dengan dasar bahwa pembuat keputusan tersebut membutuhkan dukungan atas kebijakan yang dibuat oleh aktor politik lainnya di negaranya sendiri. Pertimbangan *kedua*, adalah pertimbangan akan situasi ekonomi dan militernya. Kondisi ekonomi dan militer suatu negara dapat menjadi sokongan untuk keberlanjutan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara. Kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki suatu negara dapat mempengaruhi posisinya di dunia internasional yang mana semakin kuat ekonomi dan militer suatu negara, maka keberlangsungan kebijakannya untuk mencapai kepentingan negaranya akan berjalan. Pertimbangan *ketiga*, adalah situasi internasional. Situasi yang terjadi pada arena internasional akan mempengaruhi suatu pembuat keputusan untuk menentukan tujuan dari kebijakan luar negeri tersebut. Konteks internasional tersebut dapat diambil dari jangkauan waktu masa lampau, sekarang maupun yang mungkin akan terjadi. seorang pemimpin atau penguasa suatu negara yang ditujukan untuk masyarakat internasional, dan dapat pula sebagai sebuah agregasi kepentingan dalam negeri suatu bangsa atau negara (Warsito, 1998).

Apabila diaplikasikan dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan bahwa pengambil keputusan atau dalam hal ini Presiden Vladimir Putin mengambil keputusan luar negeri Russia dalam melakukan kerja sama dengan Indonesia dalam bidang pertahanan militer pada tahun 2014-2019 dipengaruhi oleh faktor-faktor yang digambarkan pada bagan sebagai berikut sebagai berikut:



Kerangka teori *decision making process* (Penulis, 2020)

1. Faktor Politik Domestik

Putin merupakan pemimpin Russia yang telah tergabung dalam pemerintahan Russia sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1990. Vladimir Putin merupakan Perdana Menteri Russia pada masa Boris Yeltsin dan diangkat menjadi Presiden resmi Russia setelah turunnya Boris Yeltsin pada tahun 1999. Hingga sampai 2019, Putin tetap berada dalam lingkaran pemerintahan itu sendiri. Vladimir Putin memenangi empat kali pemilihan Presiden yaitu pada tahun 2000, 2004, 2012 dan 2018. Pada tahun 2008, Dmitry Medvedev didukung oleh Putin untuk menjabat menjadi Presiden dan terpilih, dibawah pemerintahan Medvedev, Putin diangkat menjadi Perdana Menteri Russia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, negara tersebut dalam hal ini Russia mengalami transisi politik yang lebih terbuka dan plural sehingga aktor-aktor politik dapat memainkan perannya dalam memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dibuat, namun hal ini menjadi berubah dibawah pemerintahan Putin. Putin membatasi adanya pluralisme dalam politik Russia yang menghasilkan mekanisme bahwa Putin

merupakan hirarki tertinggi dalam politik pemerintahan Russia itu sendiri atau biasa disebut sebagai kekuasaan vertikal (Petrov, 2019).

Sebagaimana Putin merupakan aktor yang dominan dalam pemegang kekuasaan di Russia, Putin menjadi sentral dalam proses pemutusan kebijakan luar negerinya. Dalam hal ini, aktor-aktor seperti pejabat tinggi, kepala perusahaan negara, dan taipan bisnis yang berada dalam “lingkungan” Putin dianggap dapat diuntungkan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal tersebut dapat terjadi seperti yang disebutkan bahwa Putin berhasil untuk mengontrol dan membatasi pluralisme dalam politik Russia hingga titik dimana lembaga dan organisasi yang secara nominal bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan luar negeri Russia kehilangan otonomi dan pengaruhnya. Putin berhasil menintegrasikan mekanisme tersebut dalam politik Russia didasari atas dukungan masyarakat terhadap pendirian Putin dalam menguatkan status internasional Russia serta upayanya untuk mengembalikan kemampuan militer kepada kejayaan (Petrov, 2019).

Dalam hal ini, Putin dalam memutuskan kebijakan luar negerinya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pertahanan militer secara tidak langsung didukung oleh elit politik yang berada dalam pemerintahan Putin dan juga aktor bisnis. Pada pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, Putin menekankan bahwa akan mempererat hubungan perusahaan dan hubungan masyarakat kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa Putin dalam mengambil keputusan menimbang kepentingan aktor-aktor pendukungnya dalam pemerintahan Russia. Seperti contoh adalah proyek bersama antara perusahaan Indonesia dan *Russian Railways Company* dalam pembangunan jalur rel kereta di pulau Kalimantan yang merupakan hasil pertemuan bilateral pada 2016 bersamaan dengan kerja sama pertahanan militer (Setkab RI, 2016).

2. Faktor Situasi Ekonomi dan Militer

Russia dibawah pemerintahan Putin dianggap mampu dalam mengatasi kehancuran ekonomi pasca runtuhnya Uni Soviet atas ide Putin akan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Russia di pasar ekonomi dunia. Putin meyakini bahwa Russia memiliki sumber daya alam dan manusia yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat (Prakoso, 2012). Keberhasilan Putin dalam mengembangkan ekonomi Russia terlihat pada data bahwa terjadi tren peningkatan *Gross Domestic Product* semenjak naiknya Putin menjadi Presiden Russia (WorldBank, 2020).

Pada awal 1990, Russia memiliki GDP sebesar 516 miliar dollar AS dan terjadi tren peningkatan setelah diangkatnya Putin menjadi Presiden yang mana pada tahun 2013 itu sendiri Russia mencapai puncak tertinggi GDP nya selama tiga dekade terakhir yaitu dengan 2,292 miliar dollar AS (WorldBank-a, 2020).

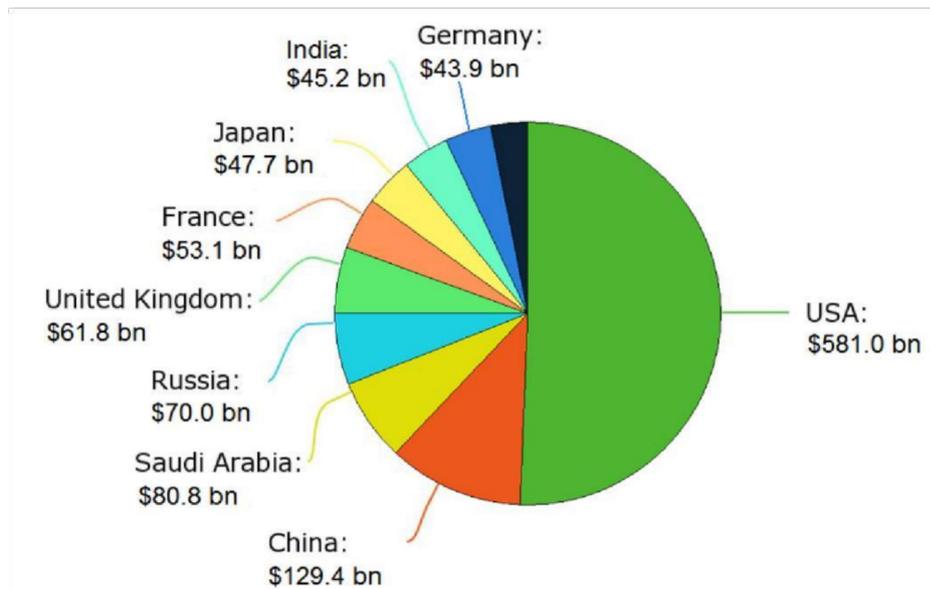
GDP Russia 1990-2019 (dalam miliar AS dollar)

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	
516	0,517	460	435	395	395	391	404	
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004		
270	195	259	306	345	430	591		
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
764	989	1.299	1.660	1.222	1.524	2.045	2.208	
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
2.292	2.059	1.363	1.276	1.574	1.669	1.700		

GDP Russia dalam miliar AS dollar 1990-2019 (WorldBank-a, 2020)

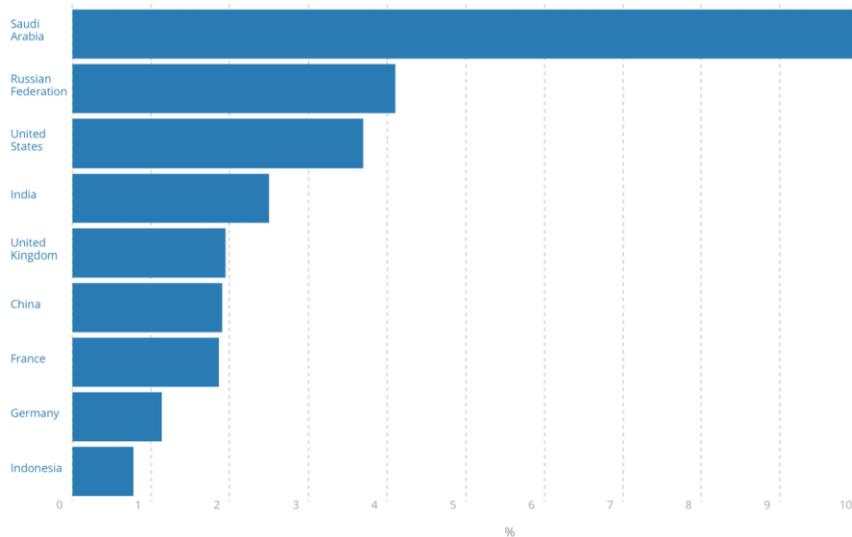
Pada gambar diatas menjelaskan kenaikan GDP Russia setiap tahunnya, walaupun demikian, Russia bukanlah negara yang tergolong maju dalam ekonominya, sebagaimana Russia hanya berkontribusi sebesar 1.5% dari global GDP (Prakoso, 2012).

Dengan peningkatan GDP tersebut, Russia termasuk negara yang memiliki anggaran militer yang besar didunia. Seperti pada data dibawah ini, Russia dengan 70 miliar dollar AS menempati posisi ke-empat setelah AS, China dan Arab Saudi (Roser & Nagdy, 2013).



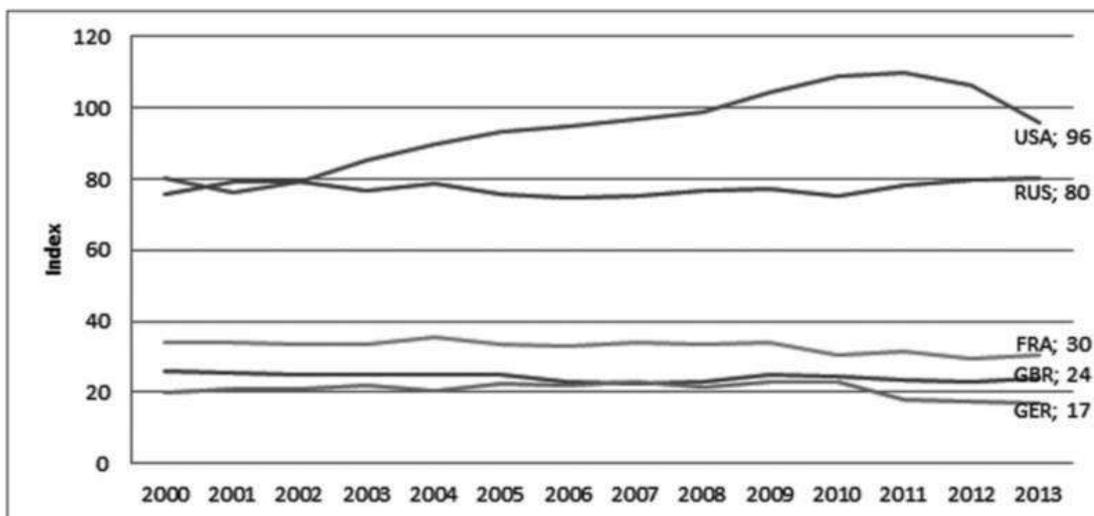
GDP beberapa negara didunia (Roser & Nagdy, 2013)

Amerika Serikat merupakan negara dengan anggaran militer tertinggi, bahkan mendominasi hampir separuh anggaran militer global dengan 581 millar dollar AS. Namun, dalam segi persenan anggaran militer dari GDPnya, Russia menempati posisi kedua setelah Arab Saudi dengan 4% dari GDP nya (WorldBank-b, 2020). Dalam segi militer, Russia menganggap bahwa dengan kekuatan militernya, negaranya merupakan negara *superpower*. Elit-elit di Russia menganggap bahwa kebijakan luar negeri dan keamanan Rusia harus menjadi bidang prioritas negara. Menurut Kaukas (2015) , Putin merupakan sosok yang mengembalikan kebutuhan akan kekuatan militer Russia sebagai negara kawasan yang dominan.



Anggaran militer negara per % GDP-nya (WorldBank-b, 2020)

Kapabilitas Russia di arena internasional merupakan suatu pencapaian Putin yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan kestabilan *Index Military Capability*. Berdasarkan data, Russia sejak tahun 2010 memuncaki peringkat dua dalam kapabilitas militernya dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat di posisi satu, Britania Raya, Jerman dan Perancis. Pencapaian Russia dalam mengembangkan kekuatan militernya ini dipercaya sebagai hasil kebijakan Putin untuk terus meningkatkan pendanaan untuk militernya (Kaukas,



2015).

Country's Index Military Capability (Kaukas, 2015)

Indonesia pada sejarahnya menjadikan Russia sebagai partner dalam pertahanan militer, seperti contoh adalah pada pemerintahan Presiden Soekarno yang mana terdapat perjanjian pencairan dana, pembangunan proyek dan pasokan peralatan militer dengan Uni Soviet saat itu, walaupun hubungan Russia dan Indonesia sempat meredup pada masa Presiden Soeharto, Russia kembali menjadi partner penting Indonesia dalam pertahanan militer. Seperti yang telah dijelaskan, Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo mempererat hubungannya dengan Russia dibidang pertahanan, Indonesia menjadikan Russia sebagai partner untuk melengkapi kekuatan atau instrumen militer Indonesia. Pada 2014, Russia dan Indonesia mendirikan perjanjian kerja sama pertahanan berupa pinjaman finansial sebesar 335 juta dolar AS untuk pembelian enam *Sukhoi fighter planes*. Selanjutnya, pada Februari 2018, Indonesia dan Rusia menandatangani kontrak untuk membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 senilai \$1,14 miliar. Keberlangsungan hubungan kerjasama ini juga tercermin pada perjanjian mengenai kesepakatan pembelian peralatan pertahanan senilai satu miliar dollar AS dalam jangka 10 tahun lebih mendatang (Manurung, 2018).

Indonesia menganggap bahwa dengan kerja sama dengan Russia lebih menguntungkan dikarenakan kualitas produk Russia serta penawaran yang menguntungkan, selain itu Indonesia menganggap bahwa Russia lebih condong untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri. Pentingnya Russia bagi Indonesia tercermin dalam perencanaan strategis Indonesia 2015-2019, yang mana Indonesia akan membeli peralatan militernya kepada Russia (Manurung, 2018). Bagi Russia sendiri, Indonesia merupakan mitra dalam perdagangan bilateral. Russia merupakan mitra terbesar Indonesia untuk kawasan Eropa Tengah dan Timur (ETT), walaupun pada awal 2010 hingga 2012 Russia dan Indonesia mengalami defisit perdagangan, tetapi beberapa perusahaan Russia

tetap optimis untuk membangun kerja sama dan berinvestasi dengan Indonesia seperti proyek kilang minyak, pembangkit listrik, dan rel kereta api. Russia dengan melakukan kerja sama dengan Indonesia juga didukung atas keberlanjutan akan peningkatan hubungannya dengan Indonesia seperti yang tertera di “*Declaration on the Framework of Friendly Relations and Cooperation of Indonesia and Russia in the 21st Century*” yang merupakan landasan dari hubungan kerjasama strategis baru dalam kerjasama bilateral, global dan regional, khususnya dalam hubungan bilateral Indonesia-Russia (Manurung, 2018).

3. Faktor Konteks Internasional

Putin dalam pemerintahnya memiliki strategi geopolitik skematis, sebuah rencana yang secara resmi diumumkan pada tahun 2010 yaitu “*Look East Policy*”. Strategi ini digunakan oleh Presiden Putin sebagai alat untuk menggapai kembali hegemoni Rusia di seluruh dunia melalui semua kawasan Asia didunia. Dengan situasi dimana China dan AS merupakan aktor dominan dan penting dalam wilayah Asia, Russia ingin menyeimbangkan kekuatan antara negara besar tersebut serta memperbarui kembali hubungan dengan negara-negara yang pernah menjadi sekutu pada masa lampau. Kebijakan *Look East Policy* memiliki poin penting yang harus digaris bawahi. Dengan kebijakan ini, Russia ingin menempatkan posisinya dalam ekonomi global serta mengurangi ketergantungan pada barat, seperti contoh adalah keinginan Russia untuk mencari pasar melalui kesepakatan perdagangan multilateral dalam bidang energi. Melalui *Look East Policy*, Putin menjalankan strateginya terhadap negara-negara yang secara historis terikat dengan Russia untuk memastikan kestabilan sosial-ekonomi dan politik dalam negeri Russia. Selain itu, secara

umum, Putin melalui kebijakan ini ingin mengembalikan menegaskan kembali pengaruh Russia sebagai negara *superpower* di arena internasional (Bakare dalam Friedman, 2020).

Sebagai wilayah yang terdapat negara-negara yang memiliki hubungan historis dengan Russia, wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah penting bagi Russia dibawah Presiden Putin untuk menjalankan strateginya. Hal tersebut didasari oleh aksi-reaksi negara besar di Asia seperti China, India dan Jepang yang condong tidak menentu perihal hubungannya dengan Russia yang dapat mempengaruhi kepentingan Russia. China menurut Russia memungkinkan untuk mengalihkan hubungannya untuk kepentingan China sendiri sebagaimana China merupakan kekuatan baru dalam dunia internasional. Russia menganggap bahwa ketergantungan akan kekuatan China tidak menguntungkan posisi Russia itu sendiri. Sedangkan dengan Jepang, hubungannya dengan Russia tidak lah begitu baik sebagaimana Jepang setuju dalam memberikan sanksi terhadap Russia atas Ukraina. Beralih ke Asia Selatan, hubungan Russia dan India semakin longgar, seperti contoh adalah keinginan India untuk meng-impor senjata dari Amerika Serikat (Storey, 2015), oleh karena itu, Russia mencoba untuk memusatkan perhatiannya kepada wilayah Asia lainnya yaitu Asia Tenggara.

Dalam sejarahnya Russia atau dikonteks ini adalah Uni Soveit memiliki hubungan erat dengan negara Vietnam dan sempat memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Dalam perkembangannya, Indonesia merupakan salah satu *partner* penting Russia di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara terbesar kedua di Asia Tenggara dalam hubungan perdagangan dengan Russia. Pada 2012 tercatat nilai kerjasama perdagangan antar kedua negara tersebut sebesar 2.87 miliar dollar AS (Storey, 2015). Russia dalam mengembalikan kekuatan

dan pengaruhnya di dunia internasional terutama Asia Tenggara menganggap bahwa Indonesia merupakan *partner* yang dapat berlangsung lama dalam menjalin hubungan.

Petimbangan Russia terhadap Indonesia dapat dilihat dari respon Indonesia pada 2018 dimana Indonesia membeli 11 jet tempur Su-35 Russia yang menghasilkan ketengangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat menekan Indonesia untuk membatalkan perjanjian tersebut, namun perjanjian tersebut masih berjalan sebagaimana Russia sudah mulai menerapkan kontrak pengiriman jet tempur Sukhoi Su-35 ke Indonesia (Manurung, 2018). Berdasarkan hal tersebut, Russia yakin bahwa negaranya akan dapat kembali muncul dalam memberikan pengaruh di kawasan Asia Tenggara dan membantu melepaskan ketergantungan negara-negara di Asia Tenggara terhadap Amerika Serikat.

Bagi Russia sendiri, Indonesia merupakan partner yang cocok untuk membantu pengembalian kekuatan Russia di Asia Tenggara. Dengan menjadi *key-partner* Indonesia dalam pertahanan militer, Russia yakin akan keberlangsungan hubungannya dengan Indonesia.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, yaitu Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Rusia dalam menjalin kerjasama pertahanan militer dengan Indonesia pada tahun 2014-2019 dengan hal tersebut memutuskan bahwa hipotesa yaitu :

1. Hipotesa pertama, *Look East Policy*, Putin menganggap Indonesia merupakan negara yang dapat mendukung posisinya dalam mengembalikan pengaruh dan kekuatan Rusia dan mengurangi dominasi dan ketergantungan terhadap

Amerika Serikat terutama di Asia Tenggara.

2. Hipotesa kedua, Faktor Ekonomi & Militer, yaitu kepentingan Russia untuk mempererat hubungannya dengan Indonesia dalam kerja sama bilateral, global dan regional. Russia dengan kemampuan militer yang kuat dan anggaran yang besar, melanjutkan posisinya sebagai *partner* Indonesia dalam kerja sama pertahanan militer dalam bentuk perdagangan senjata, bantuan finansial dan teknis.
3. Hipotesa ketiga, Faktor Politik Domestik, yaitu adanya dukungan oleh elit politik dan bisnis terhadap Rusia untuk mempererat hubungan perusahaan dan hubungan masyarakat dengan Indonesia.

E. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada pembahasan ini adalah hubungan kerjasama pertahanan militer Rusia dan Indonesia pada tahun 2014-2019 dan kebijakan kerja sama pertahanan militer dengan Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan faktor kepentingan Russia dalam bekerja sama dengan Indonesia dibidang pertahanan militer pada tahun 2014-2019 dengan menggunakan metode analisa secara kualitatif. Peneliti dalam mengumpulkan data, informasi dan referensi dari sumber yang telah ada atau disebut sebagai *secondary source*. Sumber yang cantumkan dalam penelitian ini dapat berupa buku, jurnal, berita, *press release* atau dokumen resmi suatu negara. Sebagaimana peneliti *secondary source* sebagai bahan untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian perpustakaan yang berarti peneliti menggunakan sumber-sumber yang terkait dengan subyek pembahasan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

Peneliti dalam menyusun penelitian ini membagi pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini kedalam beberapa bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini, terdapat penjabaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Pada bab ini, peneliti ingin menjelaskan tentang dinamika hubungan Russia dan Indonesia pada saat sebelum dan sesudah runtuhnya Uni Soviet hingga terpilihnya Vladimir Putin menjadi presiden Russia.

BAB III : Pada bab ini, peneliti ingin memfokuskan pembahasan mengenai hubungan Russia dibawah pemerintahan Presiden Vladimir Putin dan Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014-2019.

BAB IV : Pada bab ini, peneliti ingin membuktikan hipotesa yang telah dirumuskan pada BAB I mengenai faktor kepentingan Russia dalam bekerja sama dengan Indonesia di bidang pertahanan militer pada tahun 2014-2019.

BAB V : Pada bab ini, penulis menutup penelitian dengan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti atas hasil analisa yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya.